

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Irak merupakan bangsa kuno dan mempunyai peradaban terkuno di dunia. Negara-negara yang terletak diantara dua sungai Dajlah dan Furat yang disebut "Bainan Nahrain" yang berarti diantara dua sungai, merupakan asal berbagai peradaban kuno seperti Assyria dan Akkad, dan para penguasa imperium Iran bertahun-tahun memerintah di kawasan ini.<sup>1</sup> Pada abad ketujuh Masehi, saat imperium Sasanian kalah di tangan umat Islam, rakyat Irak sama seperti kawasan Iran memeluk agama Islam dan Irak segera menemukan peran pentingnya di dunia Islam

Realitas sejarah bahwa Irak merupakan sebuah Negara-bangsa yang terpecah-pecah kedalam beberapa kelompok ethnoreligious diantaranya yakni, secara etnik Irak terdiri dari etnis Arab dengan populasi sekitar 75-80 %, etnis Kurdi sekitar 15-20 % dan etnis kecil lainnya seperti Assyiria, Turkmon, yang hampir mencapai 5 %. Secara mazhab agama terbagi dalam kelompok aliran Syi'ah yang mayoritas sekitar 60-65 %, aliran sunni sekitar 32-37 % serta Kristen, Yazidi, dan aliran kecil lainnya yang mendekati 3 %. Sedangkan secara ideology politik terbelah antara yang berbasis Nasionalis dan Islam.

---

Pengelompokan yang bersifat sektarian itu pada perkembangannya kemudian semakin mengkristal karena dipengaruhi oleh pola penyebaran masyarakat Irak yang terfragmentasi dan terkonsentrasi ke dalam wilayah dengan didukung basis massanya masing-masing seperti, suku Kurdi yang terpusat di Irak bagian utara dekat Kirkuk, kaum Syiah yang terkonsentrasi di Irak bagian selatan dekat basra, dan kaum Sunni yang tersebar di Irak bagian tengah dekat Baghdad. Hal ini sangat dipahami mengingat sebuah masyarakat yang ditandai dengan pluralitas dan heterogenitas, didalam melakukan proses pengidentifikasian diri cenderung didasarkan pada persamaan dan perbedaan yang melekat dalam dirinya.

Diantara keistimewaan Irak ialah kehadiran mayoritas Syi'ah di negara ini. Lebih dari 60-65 % penduduk Irak adalah Syi'ah. Dikatakan bahwa penduduk negara ini lebih dari 27 juta orang. Negara ini merupakan pusat terpenting madzhab Syi'ah yang merupakan salah satu mazhab utama dalam Islam. Imam Ali as yang merupakan Imam pertama Syi'ah menetapkan pusat pemerintahannya di Kufah salah satu kota di Irak. Sementara itu, Imam Husein as yang merupakan cucu tercinta Rasulullah saw bersama para sahabat setianya gugur syahid di Karbala.<sup>2</sup>

Aktivitas kaum Syi'ah di sepanjang sejarah Irak khususnya pada abad lalu menunjukkan bahwa mereka memainkan peran aktif dan positif dalam

Utsmani, sedikit sekali perhatian diberikan kepada orang-orang Syi'ah, tetapi hal itu tidak menyebabkan mereka duduk diam dalam menghadapi penjajahan Inggris setelah tumbangannya imperium ini.

Era paling sulit untuk orang-orang Syi'ah Irak ialah pada zaman pemerintahan partai Ba'ath yang telah mencapai kekuasaan selepas kudeta tahun 1968. Pada zaman ini, beberapa organisasi baru Syi'ah telah dibentuk untuk mempertahankan hak-hak kaum Syi'ah. Para ulama pun menentang keras ekstrimisme partai Ba'ath dan politik penumpasan mereka ruhaniawan mereka. Begitu dia mencapai kekuasaan pada tahun 1979 dan setelah posisinya semakin kokoh di Irak, dia telah melakukan tekanan keras terhadap orang-orang Syi'ah. . Saddam Hussein telah melakukan penumpasan terhadap orang-orang Syi'ah terutama para ulama dan ruhaniawan mereka.<sup>3</sup>

Selain bertentangan secara politik, Sunni dan Syi'ah pun kemudian bertentangan secara teologis. Para pemikir Syi'ah membuat hukum-hukum teologi baru yang membedakan mereka dengan kaum Sunni. Sehingga menjadi mazhab teologi yang terpisah hingga kini, walaupun dalam beberapa hal, terutama fikih (ketentuan syariat), tetap memiliki kesamaan.

Mobilisasi politik Syi'ah dalam konteks modern bermula setelah kudeta 1958, dengan terbentuknya Al Dawa Al Islamiyah oleh Mahdi Al Hakim dan Mohammad Baqr Al Sadr. Tujuannya adalah untuk membentuk demokrasi

dan hak pilih, memperjuangkan Islam, memerangi ateisme (baca: komunisme) dan menciptakan Republik Islam yang belum didefinisikan. Pada 1965 seorang ulama diasingkan dari Iran dan tinggal di Najaf yaitu Ayatullah Ruhullah Khomeini.

Saddam dan Khomeini berkuasa pada tahun yang sama: 1979. Khomeini menyerukan Syi'ah Irak untuk bangkit menentang Saddam. Saddam merespons dengan satu-satunya cara yang dia ketahui. Tidak ada yang tahu persis berapa jumlah Syi'ah yang dieksekusi. Ayatullah Hakim dihukum mati, tetapi kemudian diizinkan pergi ke Iran. Pada April 1990 Saudara dan saudarinya, Amina, dihukum mati oleh Saddam.

Pada saat Saddam Hussein menaiki tambuk kepemimpinan dalam memerintah Irak, banyak terjadi konflik antar sektarian yang memang sudah ada sejak dulu. Tapi pada saat awal-awal kepemimpinan Saddam membuat suatu gerakan untuk meminimalisir konflik yang ada di Irak. Orang-orang menyebutnya sebagai masa-masa penuh dengan ketakutan karena Saddam melakukan pembersihan baik dalam tubuh partai Ba'ath maupun dalam pemerintahannya. Mulai dari Saddam menaiki jabatan sebagai Presiden dan memegang penuh kekuasaan, Saddam memerintah Negeri 1001 malam tersebut dengan otoriter dan sesuai dengan keinginannya. Tapi dengan kepemimpinan Saddam yang otoriter tersebut pertikaian antar sektarian yang selama ini berlangsung secara representatif dan terbuka mulai menurun. Saddam dapat mengontrol pertikaian yang sudah ada dengan satu-satunya jalan yang dia tahu

Saddam memahami dengan baik bahwa kekuatan orang-orang Syi'ah terletak pada ulama dan Hauzah Ilmiah Najaf. Oleh sebab itu di sepanjang pemerintahannya, dia berusaha keras menumpas dan menghapus para ruhaniawan Syi'ah dan membatasi aktifitas Houzeh Ilmiah Najaf bahkan kalau bisa menutup pusat pendidikan agama ini untuk selamanya. Dalam rangka ini bekas rezim Irak yang berkuasa saat itu telah memenjarakan, menyiksa dan menyebabkan sejumlah besar ulama Syi'ah gugur syahid. Rezim ini telah melakukan penyiksaan terhadap Ayatullah Sayid Muhammad Baqir Sadr seorang alim dan pemikir terkenal di dunia Islam sehingga beliau gugur syahid pada tahun 1980.

Demikian juga 64 orang dari anggota keluarga Ayatullah Sayid Muhsin Hakim seorang marja' besar Syi'ah telah gugur syahid sepanjang pemerintahan despotik Saddam. Dengan perilaku dan aksi kekerasan rezim ini, Hauzah Ilmiah Najaf secara perlahan kehilangan kecemerlangannya. Rezim Saddam telah menghalangi dan mencegah umat Syi'ah untuk melakukan segala macam upacara agama dalam upayanya untuk menjauhkan mereka dari identitas dan jatidiri mereka.

Pada tahun 2003 terjadinya invasi ke Irak yang di luncurkan oleh AS dan sekutunya yang mengakibatkan runtuhnya rezim Saddam Hussein dan juga tertangkapnya Saddam Hussein. Pada dasarnya perang merupakan cara untuk meraih tujuan politik ( kekuasaan ). Politik ( kekuasaan ) ditandai dengan



Celah pertarungan politik dan teologi yang berlarut-larut itulah, yang kini (akan) dimanfaatkan para pengincar Irak. AS dan Inggris yang sudah banyak rugi, dan tak mungkin mau meninggalkan Irak. Sebelum biaya perang yang mereka keluarkan mendatangkan laba, minimal "kembali modal".<sup>5</sup>

Pengadilan khusus di Baghdad menyatakan Saddam bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan yang dimaksudkan adalah peristiwa tahun 1982 di Dujail, dimana berdasarkan perintah Saddam, 148 warga Syi'ah dibunuh atas dasar dendam. Kejadian ini terjadi menyusul percobaan pembunuhan terhadap Saddam pada tahun yang sama di sebuah kota di utara Baghdad.

Selain Saddam, dua dari delapan terdakwa juga terkena hukuman gantung, yaitu saudara tirinya Barsan Al-Tikriti, mantan kepala dinas rahasia Irak, dan Awad Hamed Al-Bandar, mantan kepala pengadilan Revolusi. Para pembantu Sadam mendapat ganjaran hukuman kurungan 15 tahun sampai seumur hidup. Diantaranya mantan Wakil Presiden Taha Yassin Ramadan. Sementara seorang terdakwa dibebaskan karena kurang bukti.

Penantian terhadap pembacaan vonis Saddam Hussein menyebabkan prosedur keamanan di Irak jauh diperketat. Tentara Irak dan Amerika Serikat mendirikan pos penjagaan tambahan dan memperbanyak patroli. Di Baghdad, tiga propinsi yang saling berbatasan diberlakukan larangan untuk keluar masuk perbatasan. Namun, tidak semua mentaatinya.

## B. POKOK PERMASALAHAN

Penulisan ini mengangkat sebuah pokok permasalahan sebagai berikut:

“Apa dampak jatuhnya rezim Saddam Hussein bagi hubungan sektarian dalam negeri Irak?”

## C. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Kehidupan internasional merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan interaksi diantara unit-unit politik (negara) yang saling mempengaruhi. Hubungan-hubungan tersebut lazim disebut sebagai hubungan internasional. Hubungan internasional dapat diartikan sebagai interaksi dari aktor-aktor di mana tindakan dari para aktor tersebut membawa pengaruh terhadap aktor lainnya di luar batas yurisdiksinya. Interaksi disini dimaksudkan sebagai adanya timbal balik di mana minimal ada dua pihak yang interaksi maka baru dapat dikatakan exist suatu hubungan. Hubungan tersebut dapat disebut harmonis; dominan-dependen; atau bersifat konflik.

Interaksi dari para aktor memasuki awal abad ke-20 ini ditandai dengan hubungan dalam region atau kawasan yang merupakan suatu perubahan dalam sistem internasional. Masalah-masalah region mulai berkembang dan mewarnai sistem internasional yang telah ada. Salah satu kawasan yang digolongkan sebagai *hottension area* atau daerah yang tingkat konfliknya sangat tinggi adalah kawasan Timur Tengah.

Istiilah Timur Tengah berasal dari perluasan wilayah komando militer



sebagai persiapan perang. Dalam perang itu istilah tersebut menjadi lazim dan hampir sama sekali menggantikan istilah-istilah yang lebih tua seperti *NearEast* dan *Levant*. Dalam kerangka teori ini membahas tentang terjadinya konflik antar sektarian di Irak yang sudah lama terjadi. Pengertian dari sektarian adalah anggota, pendukung atau penganut suatu sekte atau mazhab.<sup>6</sup>

## 1. Teori Konflik

Pengertian konflik yang disinggung dalam penelitian ini merujuk pada pendapat **Pfaltzgraf** dan **Dougherty** tentang konflik yang mengandung pengertian suatu kondisi di mana sekelompok manusia terlibat dalam perlawanan dengan kelompok yang lain karena mereka terlibat dalam pencapaian tujuan yang esensial bagi keduanya.<sup>7</sup>

**Holsti** melihat bahwa konflik bisa muncul jika ada lebih dari satu pihak, di mana masing-masing pihak berbeda pandang terhadap suatu masalah, ada sikap bermusuhan, kemudian melakukan tindakan diplomatic atau militer tertentu. Dengan kata lain di dalam konflik ada pihak-pihak yang berkepentingan (*parties*), ada masalah (*issue field*), ketegangan (*tension*), dan tindakan (*action*).

Keterangannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> B.N. Marbun. S.H., *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003

<sup>7</sup> James F. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraf, *Contending Theories of International Relations: A*

1. Pihak yang bertikai : bisa merupakan aktor Negara ataupun aktor non Negara. Masing-masing pihak berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu yang tidak sesuai dengan sasaran atau kepentingan pihak lain.
2. Masalah adalah objek atau posisi yang sedang diperebutkan. Dalam hal ini ada kondisi di mana posisi tindakan yang diambil satu pihak dirasakan merugikan pihak lain.
3. Ketegangan atau permusuhan : mengacu pada sikap serta pandangan yang dianut oleh satu pihak terhadap pihak lain. Ketegangan tidak dengan sendirinya menyebabkan konflik, namun hal ini hanya mendorong masing-masing pihak untuk masuk ke dalam situasi konflik.
4. Tindakan adalah langkah-langkah yang diambil oleh salah satu pihak yang ditujukan pada pihak lainnya. Langkah ini dapat berupa tindakan diplomatik, propaganda, maneuver militer dan lain-lain.

Definisi Konflik dari **Jack C. Plato** dan **Robert E. Riggs** adalah suatu interaksi yang ditandai dengan bentrokan di antara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan dan masalah-masalah mendasar lainnya yang saling bertentangan.<sup>8</sup>

Berikutnya dibahas mengenai sumber-sumber atau akar-akar penyebab terjadinya konflik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Berdasarkan studi atas

1. Konflik territorial terbatas. Merupakan pertentangan penuntutan yang berkaitan dengan pemilikan sebidang wilayah khusus atau hak mengelola wilayah di dalam atau di sekitar daerah perbatasan dengan Negara lain.
2. Konflik yang berkaitan dengan komposisi suatu pemerintahan. Berkisar dalam pertentangan konsepsi mengenai siapa yang berhak memerintah Negara. Dalam perselisihan tersebut warna idiologi sangat jelas.
3. Konflik yang disebabkan suatu Negara berusaha mempertahankan hak territorial atau hak istimewa untuk melindungi kepentingan keamanan dan kelangsungan hidup Negara.
4. Konflik karena kehormatan nasional. Dalam konflik seperti ini, pemerintah melakukan ancaman atau tindakan militer untuk membersihkan perbuatan yang dianggap salah. Keadaan seperti ini dapat memperluas insiden kecil menjadi krisis besar.
5. Imperialisme tidak terbatas. Dalam konflik seperti ini suatu Negara berusaha menghancurkan kedaulatan Negara lain, biasanya dengan maksud idiologi, keamanan dan perdagangan.
6. Konflik pembebasan. Tampak dalam perang revolusioner yang dilakukan suatu Negara untuk “ membebaskan “ rakyat Negara lain, biasanya dilatar

7. Konflik yang disebabkan tujuan pemerintah untuk mempersatukan Negara yang terpisah.

Menurut **Usman Pelly** setidaknya dapat ditemui tiga sumber konflik yaitu:

1. Perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi. Perebutan dalam bidang ini biasanya dimenangkan oleh kelompok yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar.
2. Perluasan batas-batas kelompok sosial budaya. Perbedaan identitas sosial, tradisi, bahasa dan hukum dapat menyatukan dengan kepentingan kelompok yang dapat menimbulkan konflik, kecemburuan dan prasangka sosial dalam masyarakat
3. Benturan kepentingan politik, ideologi dan agama.<sup>9</sup>

Seorang sosiolog, **Soerjono Soekanto** mengemukakan ada empat akar konflik yaitu:

1. Perbedaan orang perorang. Perbedaan pendirian atau perasaan mungkin menyebabkan bentrokan antar orang perorang.

2. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan keperibadian dari orang perorang tergantung pula dari pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan keperibadian tersebut. Seseorang secara sadar ataupun tidak sadar, sedikitnya akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari kelompoknya. Selanjutnya keadaan tersebut dapat pula menyebabkan terjadinya pertentangan antar kelompok manusia.
3. Bentrokan antara kepentingan-kepentingan. Bentrokan-bentrokan kepentingan antara orang perorang maupun kelompok-kelompok manusia merupakan sumber lain dari pertentangan. Kepentingan tersebut dapat bermacam-macam perwujudannya, misalnya kepentingan dalam bidang ekonomi, politik dan sebagainya.
4. Perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat untuk sementara waktu merubah nilai-nilai dalam masyarakat tadi dan menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya mengenai reorganisasi dari sistem-sistem nilai yang sebagai akibat perubahan-perubahan sosial menyebabkan suatu disorganisasi dalam kemasyarakatan.<sup>10</sup>

Konflik internal secara umum dipicu oleh faktor internal terutama oleh aktor elite (kepemimpinan yang buruk). penyebab konflik bila diidentifikasi ada empat factor:

1. Faktor struktural : Negara yang lemah, perhatian, keamanan, dan geografi etnik
2. Faktor politik : diskriminasi institusi politik, mengganti ideologi nasional, politik dalam kelompok, dan politik elit.
3. Faktor ekonomi/sosial : meluasnya masalah ekonomi, diskriminasi sistem ekonomi, pembangunan ekonomi dan modernisasi.
4. Faktor budaya/persepsi : diskriminasi budaya, masalah sejarah kelompok.<sup>11</sup>

Penjelasan yang lebih komprehensif mengenai konflik juga akan menyinggung perang (*war*) sebagai bagian dari konflik. Para sarjana dalam menelaah perang didasari atas asumsi dasar bahwa, dalam perang terdapat pola-pola dan keteraturan dalam tindakan konflik yang dapat diidentifikasi secara sistematis. Jadi perang adalah perilaku yang terorganisir dari persengketaan bersenjata yang besar. Fenomena bangkitnya identitas berbagai penduduk minoritas yang merasa tidak menjadi bagian dari suatu Negara dan tidak mendapatkan bagian yang wajar berdasarkan hak-hak konstitusi dan demografi.<sup>12</sup> Penyelesaian persoalan tuntutan teritorial dan politik militan, merupakan wujud dari nasionalisme yang diorganisir atas dasar identitas etnis, bangsa, agama dan kelompok rasial, seringkali dilakukan melalui konflik senjata.

---

<sup>11</sup> Michael E. Brown, *The International Dimensions of Internal Conflict*, CSIA Studies in International Security, MIT Press, London, 1996, hal 573-579.

<sup>12</sup> Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfw, *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*, (t.p.: PT. Putera A. Bardin, 1999), hlm 382.

## 2. Teori Makro

Dalam teori makro sebab-sebab konflik terdapat seperangkat konsep yang dapat diambil dari studi konflik etnis/sektarian. Di sinilah letak pentingnya memahami konflik etnonasional karena konsep yang sama dapat diterapkan pada konflik sektarian. Apakah konflik itu didefinisikan dalam istilah-istilah etnis atau sektarian, tidak banyak bedanya secara teoretis karena konsepsi-konsepsi untuk konflik etnis dan sektarian beroperasi dengan cara yang sama. Yang penting adalah kelompok-kelompok orang-orang ini telah menggolongkan diri sebagai kelompok-kelompok yang berbeda dan mereka memandang satu sama lain sebagai *luar kelompok* atau *musuh*.

Dalam karya semifinalnya mengenai konflik etnis di negara-negara sedang berkembang, Donald Horowitz menguraikan kerangka di mana konflik sektarian itu terjadi:

Sistem negara yang mulanya muncul dari feodalisme Eropa dan sekarang, dalam periode paska kolonial, benar-benar meliputi seluruh dunia memberikan kerangka di mana konflik etnis itu terjadi. Penguasaan negara itu, penguasaan suatu negara, dan pembebasan dari penguasaan oleh kelompok-kelompok lain merupakan di antara tujuan konflik etnis.<sup>13</sup>

Salah satu tujuan utama konflik etnis adalah berusaha menguasai negara itu sendiri. Kelompok-kelompok itu berusaha menguasai negara agar dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya, biasanya dengan merugikan/merusak kelompok-kelompok pesaingnya. Konflik atas penguasaan

negara ini seringkali dipandang sebagai '*zero sum conflict*' (konflik habis-habisan). Maksudnya, kemenangan satu kelompok berarti kekalahan kelompok yang lain: konflik ini bukan "sama-sama menang" (win-win) untuk kedua kelompok itu. Meskipun ini tak pelak lagi masalah konflik inti dalam kebanyakan kasus di negara-negara yang terpolarisasi, ada juga masalah-masalah sampingan lainnya yang menambah kompleksitas situasi yang ada. Sebagaimana yang dijelaskan Horowitz:

Horowitz membedakan sistem yang beranking dan sistem yang tidak beranking. Sistem yang beranking adalah masyarakat di mana satu kelompok etnis berkuasa penuh terhadap kelompok lain. Sistem yang tidak beranking terdiri dari dua kelompok etnis dengan stratifikasi internalnya sendiri yakni elit dan massa. Horowitz lebih lanjut mencatat:

Ketika kekerasan etnis terjadi, kelompok-kelompok yang tidak beranking biasanya tidak bertujuan terjadinya transformasi sosial, tetapi bertujuan sesuatu yang mendekati otonomi kekuasaan, dengan mengucilkan kelompok-kelompok etnis yang sejajar/serupa dari pembagian kekuasaan (a share of power), dan seringkali pengembalian dengan pengusiran atau pembasmian pada status quo ante (sebelum status quo) yang diberlakukan homogen secara etnis.<sup>14</sup>

Seorang teoris lain tentang konflik etnis/sektarian yang telah memberikan sumbangsih yang besar terhadap pemahaman kita adalah Profeso Walker Connor. Connor menaruh perhatian pada kebingungan dengan istilah-



istilah dan konsep-konsep dalam literature mengenai konflik etnis. Ia percaya bahwa para pengamat seringkali mengaitkan konflik etno-nasional pada unsur-unsur lain yang tidak terlalu penting.

Singkatnya, perselisihan etnis terlalu sering dilihat secara dangkal (*superficial*) berdasarkan utamanya pada bahasa, agama, adat istiadat, ketidakadilan ekonomi, atau unsur lain yang nyata. Tetapi apa yang pada dasarnya terlibat dalam konflik semacam itu adalah perbedaan identitas dasar yang mengejawantah (mewujud) pada sindrom 'kita-mereka'.

Dalam Wikipedia Dictionary disebutkan bahwa:

*Sectarianism may, in the abstract, be characterized by dogmatism and inflexibility; sentimental or axiomatic adherence to an idea, belief or tradition; and idealism that provides a sense of continuity, orientation, and certainty. As a pejorative term, accusations of sectarianism may sometimes be used to demonize an opposing group.*<sup>15</sup>

Sektarian merupakan konsep yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu kelompok yang terikat kuat secara dogmatis dan memiliki tujuan tertentu untuk menjaga dan melestarikan eksistensi kelompok tersebut.

Kelompok Syi'ah dan Sunni memiliki perjalanan sejarah dan latar belakang berbeda meskipun eksistensi kedua kelompok tersebut beriringan dari waktu ke waktu. Kaum Syi'ah memiliki penilaian yang berbeda dengan Sunni dalam menilai sosok Saddam Hussein sebagai pemimpin Irak.

---

Kedudukan presiden dalam sistem politik di Irak sangat kuat, karena Presiden adalah Sekretaris Jenderal Partai Ba'ath merangkap Perdana Menteri dan wewenang legislative serta eksekutif selama Presiden Saddam Hussein sebagai Presiden, terdapat masalah yang dianggap sebagai pengancam keutuhan wilayahnya, juga pengancam bagi eksistensi sebagai Presiden. Yang pertama bersumber dari pusat-pusat operasi tradisional di luar pemerintahan, yaitu umat Syi'ah, suku Kurdi dan kaum Komunis. Sedangkan yang kedua bersumber pada kelompok yang berkuasa, antara lain dari angkatan bersenjata Irak dari tubuh partai Ba'ath sendiri. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut Saddam Hussein telah menyusun serangkaian langkah yang dianggap dapat menyelesaikan atau setidaknya dapat meredakan persoalan yang ada. Dalam pemerintahan Saddam Hussein terdapat tiga golongan masyarakat yang dominan dalam masyarakat di Irak yaitu kelompok Syi'ah dan kelompok Sunni. Yang menjadi unsur utama dalam membangun pemerintahan di Irak.

Disamping itu tingkah laku kedua kelompok tersebut dipengaruhi secara kuat oleh citra Saddam Hussein. Dalam pengambilan keputusan dan implementasi keputusannya sering sekali Saddam Hussein dianggap menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Masing-masing kelompok tersebut menilai Saddam Hussein berdasarkan sikap Saddam selama kepemimpinannya di Irak. Sehingga sangat mungkin apabila pemimpin dari salah satu kelompok sektarian tersebut tampil sebagai pemimpin di Irak yang akan berupaya untuk menekan sekuat mungkin kelompok sektarian yang menjadi

#### **D. HIPOTESA**

Dampak jatuhnya rezim Saddam Husein terhadap hubungan sektarian dalam negeri Irak adalah:

Semakin meruncingnya pertikaian antar sektarian di dalam negeri Irak, khususnya antar kaum Syi'ah dan kaum Sunni. Setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein, kaum Sunni yang selama ini berkuasa di pemerintahan harus mempertahankan dengan segala cara. Sedangkan kaum Syiah yang selama ini merasa ditekan oleh kaum Sunni berusaha untuk berkuasa dalam pemerintahan, karena mereka merasa bahwa mereka adalah kaum mayoritas yang harus mempunyai paling banyak suara di dalam pemerintahan.

#### **E. METODE PENGUMPULAN DATA**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui study kepustakaan (library research) dengan menggunakan menggunakan bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal dan sumber-sumber data lain. Seperti surat kabar, dan majalah yang di anggap relevan. Data yang diperoleh nantinya dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori atau konsep yang telah ditetapkan.

#### **F. JANGKAUAN PENELITIAN**

Untuk menghindari pelebaran pembahasan dan agar lebih memfokuskan pembahasan penelitian ini maka dibutuhkan batasan waktu

menginvasi Irak sampai terlaksananya vonis hukuman gantung terhadap Saddam Husein pada tahun 2006. Sektarian yang dibahas dalam skripsi ini juga hanya berdasarkan agama yaitu antara Syi'ah dan Sunni, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengulas hal-hal atau kejadian sebelumnya yang masih berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **G. TUJUAN PENULISAN**

Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selain itu penulisan ini dimaksudkan untuk menambah reverensi atau wawasan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penulisan ini

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika dari penulisan ini disusun dalam lima bab dengan berbagai sub topik pembahasan.

BAB I membahas tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II ini akan membahas tentang perpolitikan kelompok sektarian di Irak yang diawali dengan pembahasan sejarah hubungan Sektarian di Irak dari

membahas tentang kehidupan politik sektarian di Irak dalam topik ini penulis membahasnya satu persatu dimulai dengan kehidupan politik kelompok Syi'ah kemudian kehidupan politik kelompok Kurdi dan yang terakhir membahas tentang kehidupan politik kelompok Sunni.

BAB III membahas tentang runtuhnya rezim Saddam Hussein akibat invasi AS terhadap Irak. Dimulai dengan membahas tuduhan Amerika dan sekutunya terhadap kepemilikan senjata kimia dan biologi setelah itu membahas tentang invasi AS terhadap Irak, dalam topik ini penulis juga membahas satu persatu mulai dari latar belakang terjadinya invasi AS terhadap Irak setelah itu membahas tentang ketidak stabilan Irak setelah terjadinya invasi AS, dan yang terakhir membahas tentang penangkapan dan pergolakan keamanan pada saat pengadilan Saddam Hussein.

BAB IV membahas tentang dinamika hubungan sektarian setelah rezim Saddam Hussein runtuh akibat serangan ataupun juga invasi AS terhadap Irak. Pada bab ini dimulai dengan membahas reaksi dari setiap sektarian yang ada di Irak setelah runtuhnya rezim Saddam Hussein, dalam pembahasan ini penulis membahas satu persatu reaksi dari setiap sektarian di Irak dimulai dengan reaksi Sunni setelah itu membahas tentang reaksi Syiah. Dalam bab ini juga membahas tentang hubungan Sektarian di Irak Prospek dan Statusnya maksudnya bagaimana keadaan hubungan antar sektarian setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein dan juga setelah jatuhnya hukuman mati bagi Saddam Hussein. Dalam bab ini tidak akan membahas masalah kelompok Kurdi karena jangkauan penelitiannya hanya

bab ini juga membahas bagaimana meruncingnya pertikaian antar sektaraian baik yang mempertahankan ataupun juga yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan.